

MENGANTISIPASI DAMPAK BENCANA ALAM

Sri Rahayu Pudjiastuti

Pasca Sarjana PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok

email: yayu.pudjiastuti@gmail.com

Abstrak :Pengetahuan masyarakat akan adanya peringatan bencana alam menentukan kesiapsiagaan masyarakat terhadap dampak bencana alam di masa mendatang. Rata-rata persentase rumah tangga yang mengetahui tentang adanya tanda-tanda atau peringatan tanggap darurat bencana alam dilingkungan tempat tinggalnya di seluruh Provinsi adalah: 11,35% di perkotaan dan 8,08% di pedesaan. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terutama yang berkaitan dengan keselamatan jiwa seseorang akan memperbesar tingkat risiko menjadi korban dalam menghadapi dampak bencana alam yang akan terjadi.

Kata Kunci: Pengetahuan Masyarakat, Bencana Alam

A. PENDAHULUAN

Sejak awal tahun hingga 4 Desember 2017, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat telah terjadi 2.175 kejadian bencana di Indonesia. Adapun jumlah tersebut terdiri dari banjir 737 kejadian, puting beliung 651 kejadian, tanah longsor 577 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 96 kejadian, banjir dan tanah longsor 67 kejadian, kekeringan 19 kejadian, gempa bumi 18 kejadian serta letusan gunung api 2 kejadian. Kepala pusat data informasi dan humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kejadian bencana di Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahun. (Jakarta, Kompas.Com).

Berdasarkan kenyataan besarnya dampak bencana alam bagi kehidupan masyarakat, kesiapsiagaan masyarakat harus segera diwujudkan agarantisipasi masyarakat terhadap dampak bencana alam dapat dilakukan. Intensitas bencana yang semakin meningkat tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis global dan regional berupa pemanasan global (*global warming*) yang menyebabkan peningkatan suhu, perubahan iklim, meningkatnya permukaan air laut, dan perubahan ekologi yang memberikan pengaruh besar kepada peluang terjadinya bencana alam. Menurut Sutopo, sebanyak 95% kejadian bencana di Indonesia adalah bencana

hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi cuaca. Seperti longsor, kekeringan, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem. Dari kejadian tersebut, jumlah korban meninggal mencapai 335 orang, korban luka-luka sebanyak 969 orang dan korban mengungsi dan menderita sebanyak 3,22 juta orang. Sementara itu, kerusakan yang dihasilkan yakni 31.746 rumah rusak, 347.813 unit terendam, ribuan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan peribadatan rusak. (Jakarta, Kompas.Com).

Kecenderungan semakin tingginya kejadian bencana alam seharusnya mendorong kita untuk mempersiapkan diri, keluarga, dan masyarakat di sekitar kita yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk mengantisipasi dampak bencana alam dan meminimalkan korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan dan kerugian.

Besarnya kerugian dan jumlah korban, serta kerusakan yang dihasilkan dampak bencana alam tersebut memperlihatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi dampak bencana alam masih rendah. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan pokok masalah yang harus dipecahkan adalah kesiapsiagaan masyarakat saat ini kenyataannya belum optimal sehingga antisipasi dampak bencana alam masih lemah. Oleh karena itu diperlukan sebuah konsepsi yang tepat untuk memperbaiki kondisitersebut.

B.PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh selama pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang terjadi sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh pokok-pokok persoalan yaitu; kurangnya pengetahuan masyarakat, dan lemahnya sistem peringatan dini.

Kurangnya pengetahuan masyarakat yang dimaksud di sini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang potensi ancaman bencana alam yang ada di wilayah tempat tinggalnya dan langkah-langkah praktis yang harus dilakukannya dalam keseluruhan siklus penanggulangan bencana. (Ambari, 2016). Kurangnya pengetahuan masyarakat ini akan mengakibatkan antisipasi dampak bencana alam pada sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana alam menjadi lemah sehingga menimbulkan korban jiwa, kerugian dan kerusakan tatanan kehidupan yang cukup berarti. Kondisi

ini akan menjadi cerminan pola pikir dan pola sikapnya yang menjadi alasan utama masyarakat untuk melakukan kegiatan perlindungan atau upaya kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah yang rentan terhadap bencana alam.

C. LANDASAN TEORI

Kesiapsiagaan adalah kegiatan yang sifatnya perlindungan aktif yang dilakukan pada saat bencana terjadi dan memberikan solusi jangka pendek untuk memberikan dukungan bagi pemulihan jangka panjang (Sutton Tierney, 2006 dalam Dodon, 2013). Kesiapsiagaan menurut Gregg (2004) dalam Dodon (2013) bertujuan untuk meminimalkan efek samping bahaya melalui tindakan pencegahan yang efektif, tepat waktu, memadai, efisiensi untuk tindakan tanggap darurat dan bahan bantuan saat bencana. Upaya kesiapsiagaan juga bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk tanggap dalam peristiwa bencana dapat digunakan secara efektif pada saat bencana dan tahu bagaimana menggunakannya (Sutton dan Tierney, 2006 dalam Dodon, 2013).

Landasan teori yang digunakan untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat adalah model ketahanan masyarakat (*Community Resilience*) yang dikembangkan Norris dkk. (2008). Ketahanan (*Resilience*) sebagai suatu proses yang menghubungkan sebuah rangkaian kemampuan beradaptasi menuju lintasan positif dari fungsi dan adaptasi dari suatu gangguan. Kemampuan beradaptasi merupakan sumber daya dengan sifat-sifat dinamis, suatu titik padanya kita akan kembali sesaat. Kemudian teori *sinergisme substantive Theory* yang dikemukakan Benecke, G., Schurink, W., dan Roodt, G. (2007) juga menjadi landasan teori yang digunakan dalam mengembangkan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Teori ini terdiri atas tiga fase yakni fase faktor-faktor stimulus yang mempengaruhi sinergi, fase prosestransformasi/institusi (mengawasi manajemen melaksanakan sinergi dalam perusahaan), dan fase respon/keluaran (tindakan manajemen melaksanakan keputusan-keputusan sinergi).

Disamping itu dalam memotivasi masyarakat menuju kesiapsiagaan maka

landasan teori yang digunakan adalah teori kognitif sosial, yang dikembangkan oleh Albert Bandura (1989), didasarkan atas proposisi bahwa baik proses sosial maupun proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan tindakan manusia. (Tarsidi, 1999). Sesuai dengan teori kognitif soaial maka kesiapsiagaan masyarakat dapat ditumbuh kembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip; 1) Asumsi tentang hakikat dan kemampuan manusia; 2) lima kapabilitas kognitif dasar yang dimiliki manusia (*symbolising, forethought, self-regulation dan self-reflective*); 3) Proses interaksi antara manusia dan lingkungannya; 4) cara manusia belajar perilaku (*observational learning dan enactive learning*); 5) Fungsi insentif sebagai sistem pengatur perilaku manusia; 6) Proses pembentukan *self-efficacy* dan fungsinya; 7) Fungsi tujuan (*goal*); dan 8) Aplikasi teori kogmitif sosial dalam konseling.

Kesiapsiagaan tidak hanya melakukan berbagai tindakan-tindakan pencegahan, melainkan juga dengan penyesuaian kondisi bangunan yang menjadi tempat tinggal (Krebich et al, 2004 dalam Dodon, 2013). Misalnya adalah dengan menaikkan pondasi bangunan rumah. Sutton dan Tierney (2006) dalam Dodon (2013) membagi beberapa indikator kesiapsiagaan antara lain adalah pengetahuan terhadap bahaya yang akan dihadapi (resiko, kerentanan, pengetahuan terhadap bencana), kebijakan dan panduan kesiapsiagaan, rencana untuk keadaan darurat, sistem peringatan bencana, dan kemampuan memobilisasi sumber daya.

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi dan data mutakhir tentang pengalaman bencana dan potensi bencana yang mungkin terjadi di masa mendatang, yang terukur melalui indeks risiko bencana yang telah dipublikasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kunci awal dari upaya pengurangan risiko bencana adalah pemahaman risiko bencana. Demikian dikatakan oleh Wisnu Widjaya, Deputy Pencegahan dan kesiapsiagaan, BNPB dalam pembukaan acara sosialisasi dan lokakarya penilaian Ketahanan Daerah dalam rangka penurunan indeks Risiko Bencana Jakarta pada Rabu, 21 November 2018. Acara ini bertujuan untuk melakukan penilaian Indeks Ketahanan

Saerah (IKD) pada lokus RPJMN 2015-2019, memvalidasi data IKD, membicarakan issue-issue terkini dalam upaya penanggulangan bencana, dan melakukan sinkronisasi program dan kegiatan di pusat dan daerah.(inarisk.bnpb.go.id.), maka kesiapsiagaan masyarakat yang diharapkan agar mampu mengantisipasi dampak bencana alam antara lain; pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana alam mengalami peningkatan, tumbuhnya sinergisme antar pemangku kepentingan, tersedianya peringatan dini yang efektif, dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui peran lembaga kemanusiaan. Oleh karenanya, mengantisipasi, merencanakan dan mengurangi resiko bencana melalui kesiapsiagaan masyarakat sangat mendesak dan penting untuk dilakukan demi melindungi kesejahteraan, kesehatan, warisan budaya, aset sosial ekonomi dan ekosistem manusia, komunitas dan negara secara lebih efektif, sambil juga memperkuat ketahanan nasional. Sudah seharusnya sebagai bangsa hidup di wilayah yang tinggi potensi bencana alamnya untuk mengetahui kesiapsiagaan masyarakatnya dalam menghadapi bencana yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang, maka diperlukan sumber daya manusia yang siap menjadi sukarelawan.

Berdasarkan Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sumber daya manusia Indonesia seluruhnya terdiri atas sukarelawan yang memiliki jiwa pengabdian bagi kemanusiaan. Keberadaan sukarelawan kemanusiaan merupakan ujung tombak dalam seluruh kegiatan kemanusiaan di seluruh tingkatan organisasi. Partisipasi sukarelawan kemanusiaan dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana baik di dalam maupun diluar negeri diharapkan semakin baik dan profesional sehingga diakui dalam setiap aksi kemanusiaan. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas sekarelawan kemanusiaan harus menjadi prioritas perhatian sehingga diharapkan kapabilitas dan akuntabilitas sukarelawan dalam mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat guna mengantisipasi dampak bencana alam semakin meningkat.

Beberapa fakta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang tercatat dan merupakan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah perbaikan antara lain:

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Penanggulangan Bencana Alam

Kepala pusat data informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, budaya sadar bencana punya peran penting bagi masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana. Kesadaran tinggi itu bisa muncul seiring peningkatan pengetahuan akan bencana itu sendiri. Namun sayangnya pengetahuan akan bencana tak diikuti oleh sikap atau tindakan. Pengetahuan bencana meningkat sejak tsunami Aceh, tetapi belum jadi sikap, perilaku, dan mitigasi kita masih cukup lemah. (Sutopo; 2018). Berdasarkan data BNPB tersebut, tercatat hanya sekitar 9,71 persen rumah tangga yang mengetahui adanya tanda-tanda atau peringatan untuk mengatasi bencana alam di lingkungan tempat tinggalnya. Keadaan ini sedikit berbeda untuk rumah tangga yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan. Hal ini mengindikasikan masih sangat kurangnya kesiapsiagaan masyarakat Indonesia.

Di samping itu, tercatat pula persentase rumah tangga yang pernah mengikuti pelatihan atau simulasi penyelamatan bencana alam dalam tiga tahun terakhir masih sedikit yaitu hanya 1,2 persen. Keadaan ini menandakan bahwa kepedulian berbagai pihak dalam upaya penyelamatan bencana masih kurang. Jika dilihat berdasarkan provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang mengikuti pelatihan atau simulasi penyelamatan bencana dalam tiga tahun terakhir yaitu Provinsi DI Yogyakarta (6,49%), sedangkan yang terendah yaitu Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,3% rumah tangga.

Bangka Belitung dengan persentase terendah rumah tangga yang mengikuti pelatihan atau simulasi penyelamatan bencana menjadi provinsi yang berisiko tinggi dalam mengantisipasi dampak bencana alam yang terjadi. Hal tersebut dialami Bangka Belitung pada Pebruari tahun 2016 dengan sangat mengejutkan masyarakat, karena tidak menyangka akan mengalami bencana banjir yang sangat besar dan sempat melumpuhkan aktivitas perekonomiannya.

Kondisi kesiapsiagaan masyarakat juga dapat dilihat dari pernah tidaknya masyarakat mengikuti simulasi terhadap penyelamatan bencana alam. Tercatat sampai tahun 2017 persentasi kepala rumah tangga yang pernah mengikuti simulasi terhadap penyelamatan bencana alam rata-rata cukup tinggi, mencapai 84% di

perkotaan dan pedesaan. Sedangkan selain kepala rumah tangga rata-rata mencapai 15% di perkotaan dan pedesaan.

Oleh karenanya, mengantisipasi, merencanakan dan mengurangi risiko bencana melalui kesiapsiagaan masyarakat sangat mendesak dan penting untuk dilakukan demi melindungi kesejahteraan, kesehatan, warisan budaya, aset sosial ekonomi dan ekosistem manusia, komunitas dan negara secara lebih efektif. Sudah seharusnya sebagai bangsa hidup di wilayah yang tinggi potensi bencana alamnya untuk mengetahui kesiapsiagaan masyarakatnya dalam menghadapi bencana yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang.

Masyarakat dari segala tingkat pendidikan memperoleh informasi-informasi memadai tentang penanggulangan bencana alam yang disampaikan oleh pemerintah atau pihak berwenang baik melalui penyuluhan langsung ataupun melalui media massa cetak atau televisi, diskusi, pendidikan dan pelatihan serta simulasi. Masyarakat akan selalu mengikuti perkembangan informasi-informasi tentang bencana alam. Berdasarkan pengetahuan tersebut masyarakat bisa mengetahui tanda-tanda bencana alam., apa yang harus dilakukan setelah bencana terjadi, jalur evakuasi dan alternatif apa yang dilakukan untuk mengantisipasi dampak bahaya bencana alam. Kegiatan mitigasi bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah juga memegang peranan penting dalam menambah perbendaharaan pengetahuan masyarakat tentang bencana alam di wilayahnya.

Dengan kegiatan mitigasi bencana alam tersebut diharapkan masyarakat tidak ada lagi yang awam terhadap potensi bencana alam di wilayahnya. Jika bencana alam tersebut terjadi masyarakat tidak lagi cemas yang berlebihan karena sudah siap sedia dengan pengetahuan yang mereka peroleh dari pihak pemerintah dan lembaga yang berkepentingan lainnya. Dengan modal pengetahuan dan wawasan yang ada masyarakat tidak mudah percaya dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan tidak panik serta takut yang berlebihan. Pengetahuan penanggulangan bencana akan sangat membantu masyarakat mengatasi kepanikan ketika bencana itu datang serta tidak mudah percaya pada isu-isu yang beredar. Masyarakat juga mengetahui informasi dari lembaga mana dan dari siapa yang harus mereka dengarkan terkait

dengan bencana alam.

Disamping pengetahuan tentang bencana alam, masyarakat juga akan sudah mengetahui daerah-daerah yang menjadi tujuan evakuasi atau daerah yang relatif aman untuk berevakuasi ketika bencana alam tersebut terjadi serta jalur-jalur yang harus ditempuh kelokasi tersebut. Dengan pengetahuan tersebut masyarakat juga akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan nanti selama berada di lokasi evakuasi jika bencana tersebut benar-benar terjadi, antara lain makanan siap saji, minuman kaleng, pakaian, dan dokumen-dokumen berharga, penerangan seperti senter, dan lampu cas sebagaiantisipasi jika listrik sebagai sumber penerangan utama mati, mempersiapkan kendaraan dengan cara memarkirnya menghadap ke jalan, dan menyimpan kuncinya di tempat yang mudah dijangkau jika sewaktu-waktu hal itu diperlukan. Masyarakat juga akan mengenal bangunan yang mereka tempati sudah sesuai dengan standar rumah tahan gempa yang ditetapkan oleh pemerintah atau belum sehingga diharapkan akan ada perbaikan kualitas rumah.

2. Peringatan Dini Bencana

Pengetahuan masyarakat akan adanya peringatan bencana alam juga menentukan kesiapsiagaan masyarakat terhadap dampak bencana alam di masa mendatang. Rata-rata persentase rumah tangga yang mengetahui tentang adanya tanda-tanda atau peringatan tanggap darurat bencana alam dilingkungan tempat tinggalnya di seluruh Provinsi adalah 11,35% di perkotaan dan 8,08% di pedesaan. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terutama dalam hal yang berkaitan dengan keselamatan jiwa seseorang akan memperbesar tingkat risiko menjadi korban dalam menghadapi dampak bencana alam yang akan terjadi.

Pada kasus gempa yang terjadi di Aceh pada bulan April 2012, sebagian sirine tanda bahaya rusak dan terlambat diaktifkan. Cara evakuasi yang benar pun belum dipahami. Setelah kejadian gempa besar di Aceh pada Rabu, 11 April 2012 yang terjadi adalah kepanikan warga yang menimbulkan kemacetan dan keruwetan. Kepanikan terpantau disepanjang pantai barat, seperti Banda Aceh, Aceh Barat, dan Simeulue. Jalanan macet dan terjadi kecelakaan di sejumlah ruas jalan. Tak ada sumber informasi tentang kemungkinan tsunami. Sebagian besar informasi tersebar

secara lisan orang perorang saja. Wargapun tak mengetahui bahwa mengungsi sebaiknya tanpa kendaraan bermotor dan mengikuti jalur evakuasi. Kepanikan juga melanda warga Simeulue. Banyak warga menyelamatkan diri ke perbukitan dengan mengendarai sepeda motor dan mobil. Akibatnya, jalanan macet dan warga nyaris tak bisa bergerak. Sosialisasi antisipasi gempa pernah diterima masyarakat dari sejumlah lembaga sosial yang didanai organisasi internasional pada tahun 2006 dan 2007, namun tak ada tindak lanjut lagi.

Demikian juga di kota Padang, pasca gempa, sejumlah ruas jalan terkunci dan macet panjang. Sejumlah simulasi bencana yang pernah dilakukan nyaris tak terlihat dampaknya. Seusai tsunami, dikawasan pesisir Banda Aceh dibangun empat bangunan penyelamat (evakuasi) berkapasitas 800-1000 pengungsi. Namun, setelah gempa, warga yang memanfaatkan bangunan itu kurang dari 50 orang per bangunan. Kepanikan warga pasca gempa salah satunya disebabkan antisipasi bencana gempa dan tsunami yang parsial. Kepanikan itu ditambah ketidaksiapan aparat keamanan dalam memandu warga.

Berdasarkan hasil kajian tentang penanggulangan bencana alam Indonesia (JICA, 2009) yang dikeluarkan pada tahun 2009, BMG telah mengembangkan sistem peringatan dini pada tingkat nasional, namun masih lemah dan ada yang masih belum dibentuk. Konsep sistem peringatan dini dari segi meteorologi, Indonesia dibagi menjadi 29 wilayah, dan pusat-pusat wilayah di tiap-tiap daerah digunakan untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi dari alat-alat/stasiun pengamatan data dan BMG pusat dan juga kepada organisasi pusat/daerah serta masyarakat.

3. Sinergisme Antar Pemangku Kepentingan

Sinergisme antar pimpinan nasional mutlak diperlukan, karena sebuah negara akan maju dan berkembang sangat tergantung kepada sinergisme kinerja para pemimpinnya. Sebaliknya, sebuah negara disebut gagal juga sangat dipengaruhi oleh sinergisme para pemimpinnya. Oleh karenanya, sinergisme antar pemangku kepentingan penanggulangan bencana dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menjadi mutlak untuk keberhasilan mengantisipasi dampak bencana

alam.

Terlaksananya sinergisme para pemangku kepentingan akan memudahkan penatalaksanaan penyaluran bantuan kemanusiaan dalam penanggulangan bencana alam sehingga terhindar dari terjadinya penumpukan bantuan dan tidak tersalurkan bantuan kemanusiaan pada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tersebut. Sinergisme pemimpin nasional dalam menjamin penyaluran bantuan untuk peningkatan kesiapsiagaan masyarakat guna mengantisipasi dampak bencana alam menjadi sangat penting karena pemimpin nasional dari pusat sampai ke daerah merupakan panutan bagi sebuah komunitas atau masyarakat dan rakyat di seluruh Indonesia. Sehingga sangat diharapkan kedepan sinergisme pemimpin nasional dalam penanggulangan bencana semakin kuat dan efektif sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat guna mengantisipasi dampak bencana alam.

Di samping itu, sinergisme dari semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana sebagai konsekuensi dari semangat kebersamaan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat diharapkan juga dapat terwujud agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat guna mengantisipasi bencana alam. Sinergisme antar pemangku kepentingan penanggulangan bencana yang dibangun di masa mendatang diharapkan berupa hubungan yang saling menguntungkan antar bagian dan antar sektor bagi tercapainya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan informasi yang diolah dan dihasilkan oleh suatu bagian atau sektor akan bermanfaat bagi bagian atau sektor-sektor penanggulangan bencana lainnya, serta sinergisme antar unsur-unsur pemerintah sendiri dan antara pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat akan semakin meningkat.

Dalam sinergisme kesiapsiagaan masyarakat tidak hanya ada pada tangan pemerintah pusat, tetapi juga peran pemerintah daerah dan masyarakat dengan kondisi masyarakat memiliki keterbukaan dalam menyampaikan gagasan kepada pemerintah dalam situasi yang saling mempercayai. Sehingga dengan sinergisme yang berjalan baik kemampuan pemerintah dalam memobilisasi sumber daya

menjadi tepat sasaran, merata dan tidak terjadi tumpang tindih. Sinergisme antara masyarakat dengan pemerintah di masa mendatang diharapkan melibatkan perpaduan pengetahuan dari kedua belah pihak. Pemerintah memiliki tanggungjawab dan wewenang yang besar dalam mengembangkan sinergisme kesiapsiagaan masyarakat, sehingga prosedur darurat berjalan dengan baik, dan perangkat peringatan dini bekerja. Melalui sinergisme diharapkan kepentingan dan peran masyarakat dapat terakomodir dalam dokumen kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga posisi masyarakat sebagai ujung tombak kesiapsiagaan menjadi efektif.

Dalam sinergisme juga sangat diharapkan lebih dikedepankan keterlibatan masyarakat dalam perancangan kebijakan maupun pengambilan keputusan yang sama derajatnya dengan pemerintah, sehingga terealisasi kesiapsiagaan yang bersifat arus bawah demi menggalang masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana alam melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat guna mengantisipasi dampak bencana alam. Berkenaan dengan sinergisme yang diharapkan seluruh masyarakat mampu melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, sehingga mampu mengkombinasikan antara berbagai kepentingan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat kebiasaan (budaya) masyarakat setempat. Di samping itu, masyarakat dapat bersinergi bersama pemimpin nasional baik formal, maupun nonformal dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam upaya mewujudkan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat guna mengantisipasi dampak bencana alam.

4. Kondisi Kesiapsiagaan Masyarakat Yang Diharapkan

Berdasarkan pengalaman bencana alam yang terjadi sebelumnya dan rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi masyarakat dalam mengantisipasi dampaknya, terlihat begitu besar kerugian, kerusakan dan korban jiwa yang diderita masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk meminimalisasi kerugian, kerusakan dan korban jiwa akibat bencana alam yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dalam kaitannya dengan pendekatan siklus bencana, (Ambari, 2011) beberapa kegiatan yang dapat dilakukan agar memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut diantaranya adalah:

- a. Sebelum terjadinya bencana, melakukan program penyuluhan, perencanaan evakuasi, pemahaman tentang sistem peringatan dini, pelatihan dan simulasi kondisi darurat bencana.
- b. Saat terjadi bencana, masyarakat harus mampu merespons dengan tepat dan cepat, sehingga akan mengurangi kerugian, hilangnya nyawa, harta benda dan kerusakan lingkungan.
- c. Pada pasca bencana, pemerintah bersama masyarakat mampu melakukan pemulihan bagi masyarakat melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga masyarakat yang terkena dampak bencana alam dapat hidup seperti sedia kala.

5. Indikasi Keberhasilan

Indikasi keberhasilan yang diharapkan, tercapainya efektivitas dan efisiensi kesiapsiagaan masyarakat (Yamin;2013) adalah: Tumbuh kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bencana. Masyarakat sadar akan pentingnya penanggulangan bencana sebagai konsekuensi tinggal diwilayah dengan potensi bencana yang tinggi. Beberapa indikasi yang tampak dengan kesadaran masyarakat ini antara lain;

- 1) Jumlah masyarakat yang mengikuti perkembangan bencana meningkat.
- 2) Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bencana meningkat.
- 3) Jumlah tempat tinggal tahan bencana meningkat.
- 4) Jumlah kunjungan kesumber informasi bencana meningkat.
- 5) Jumlah keluarga menyimpan makanan saat darurat meningkat.
- 6) Jumlah keluarga menyimpan perlengkapan darurat meningkat.
- 7) Jumlah masyarakat peduli lingkungan meningkat.

E. KESIMPULAN

Konsepsi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat yang tepat saat ini adalah yang

memberdayakan masyarakat pada setiap tingkatan usia, dan komunitas beserta kearifan lokalnya dengan melibatkan transfer teknologi mutakhir yang sudah berkembang serta didukung oleh langkah-langkah pengikisan egosektoral dan ekosentris pemerintah dan membangun sinergisme yang kuat dalam manajemen penanggulangan bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambari, Muhamad Djazuli. 2008, *Efektifitas Penanggulangan Bencana Oleh Bulan Sabit Merah Indonesia* (kasus bencana gempa dan tsunami Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2004-2005). Tesis: Jakarta, UI.
- Ambari, Muhamad Djazuli.2016, *Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Guna Mengantisipasi Dampak Bencana Alam Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Benecke, G. Schurink, W. Dan Roodt, G. 2007. "Towards A Substantive Theory Of Synergy" *Journal of Human Resource Management*, 5(2). H.9-19.
- BNPB.go.id. Ketahanan Daerah dan Indeks Risiko Bencana, 23 November 2018. 03:56WIB
- Dodon Yamin.2013. "Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat Di Pemukiman Padat Penduduk Dalam Antisipasi Berbagai Fase Bencana Banjir". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.24 No.2 (Agustus 2013): h.125-140.
- JICA. 2009, *Kajian Tentang Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia*.
- Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com.2017/12/21>.
- Norris, Fran H.et.all.2008."Community Resilience as a Metaphor, Theory, set of Capacities, and Strategy for Disaster Redianess." *Am J Community Psychol* (2008) 41 h.127-150
- Sutton, Jeannette, dan Tierney, Kathleen.2006. *Disaster Preparedness: Concepts, Guidance, and Research*. Colarado:University of Colorado.
- Sutopo, 2 Oktober 2018, Jakarta Kantor Kemenkominfo. <https://nasional.kompas.com>.

Tarsidi, Didi, 1999, *Teori Kognitif Sosial Albert Bandura*, Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia.

Yamin, Dodon. 2013, “Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat di Pemukiman Padat Penduduk dalam Antisipasi Berbagai Fase Bencana Banjir”. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.24 No.2 (Agustus 2013): hlm.125-140.